

Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Pendidikan di Wilayah Kepulauan Kasiruta Timur

Ali Lating^{1✉}, Fathun Tan² dan Fauziah Nurhamiddin³

¹ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMMU, Ternate, Indonesia.

² Dosen Program Studi Administrasi Publik UMMU, Ternate, Indonesia.

³ Dosen Program Studi Matematika MIPA Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia.
e-mail : alilating72@gmail.com, Fathnuntan1007@gmail.com, fauziahnurhamiddin15@gmail.com

Info Artikel : Artikel Penelitian Artikel Pengabdian Riview Artikel
Diterima : 15 Mei 2021, Disetujui : 19 Juni 2022, Publikasi On-Line : 21 Jan 2022

Vol.	No.
2	1
Hal : 9 - 15	

✉ Koresponden Author :

Ali Lating

e-mail :
alilating72@gmail.com
Universitas Muhammadiyah
Maluku Utara
Ternate-Indonesia



Copyright©
Ali Lating, Fathun Tan,
Fauziah Nurhamiddin

Abstrak.

Sebagai personifikasi negara di tingkat daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sangat penting, terutama untuk menjamin kecukupan pelayanan di berbagai aspek. Salah satu aspek terpenting yang terkait dengan masa depan generasi penerus bangsa adalah layanan pendidikan. Sebagai landasan, Pasal 31 UUD 1945 dan lembaga turunannya menunjukkan tujuan mulia, yaitu terwujudnya potensi peserta didik yang beriman dan bertakwa, bertanggung jawab, mandiri, untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, melalui pendidikan. Satuan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat rendah, sampai ke perguruan tinggi. Dinamika pengelolaan pendidikan di wilayah kepulauan seperti Provinsi Maluku Utara masih dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti yang dialami di Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Aksesibilitas, distribusi dan ketersediaan sarana prasarana masih terbatas, baik yang berkaitan dengan fasilitas pembelajaran, perpustakaan hingga ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur pendukung mengakibatkan kebijakan pengembangan mutu pendidikan terabaikan. Kondisi ini diperlemah dengan terbatasnya pengawasan dan komitmen pemangku kepentingan dalam merespon permasalahan yang dialami di wilayah tersebut.

Keyword : Aksesibilitas, pelayanan pendidikan, keterbatasan

I. PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peran strategis dalam usaha untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik dan berbudaya. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern peranan pendidikan dalam pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan semakin penting. (Zamroni, 2000:113). Artinya pembangunan pendidikan yang memberikan kesempatan penuh bagi masyarakat adalah penting dan harus diutamakan jika itu dianggap sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkesinambungan negara memiliki peran penting untuk mewujudkannya. Di sejumlah negara maju tanggung jawab dan peran penting negara untuk menghasilkan (*output human resource*) sumber daya manusai yang kompeten adalah benar- benar dipikirkan secara sistematis. Keseriusan untuk hal tersebut ditunjukkan dengan menyediakan saran prasaran yang memadai sebagai penunjang kearah tersebut. Pendidikan yang bermutu dapat terwujud dengan menyediaan sumber dana yang optimal dengan kata lain " *financial and education*" adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Artinya bisa dikaji secara terpisah tetapi harus dilihat secara keseluruhan. Anggaran pendidikan suatu negara dapat diperoleh dengan mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber strategis secara optimal, hasil pengelolaan tersebut tidak hanya diperuntukan untuk menggerakkan sektor pertanian strategis namun pada saat yang sama dapat diinvestasikan dalam sektor pendidikan terutama dalam menyediakan infrastruktur baik fisik maupun saran prasaran non fisik seperti tenaga pendidik dan kependidikan. (Rusli Yusup, 2011: 8). Bagi wilayah Indonesia yang sebahgian besar merupakan wilayah kepulauan problem pendidikan dapat ditelusuria dari beberapa faktor seperti : *Pertama*, Availability (*ketersediaan*) saran prasaran seperti laboratorium,

perpustakaan yang memadai, ruang kelas yang representatif, fasilitas penunjang pembelajaran baik itu buku pelajaran maupun fasilitas olahraga dan sarana UKS masih perlu menjadi perhatian serius. *Kedua*, *Accesibility (Keterjangkauan)*, terkait akses masyarakat terhadap satuan pendidikan.

Sebagian masyarakat hanya mudah untuk mengakses satuan pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah baik negeri maupun yang didirikan oleh pihak swasta, namun untuk tingkat SMP/Tsanawiah dan SMU/ Aliyah hingga saat ini masih menjadi persoalan serius sebahagian besar masyarakat. Satuan pendidikan tingkat SMU/ Aliyah mudah diakses di wilayah perkotaan. Ketiga *Distribution (pemerataan)* Ketimpangan jumlah guru dan murid maupun dalam hal ketersediaan tenaga pendidik maupun sarana prasarana (buku, alat peraga dll) masih menjadi persoalan rasio guru dan murid pada wilayah tertentu sangat jelas dan perlu menjadi perhatian serius. (Lating, 2014:92-93). Sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri. Kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU No 20 Tahun 2003), pendidikan perlu menjadi perhatian serius sebab jika pendidikan dipandang gagal dalam membangun bangsa (*watak negara*) berarti ada yang salah dalam pendidikan. Sebahagian kalangan menyebut kegagalan pendidikan yang disebabkan karena adanya disorientasi pendidikan, pendidikan yang sejatinya dapat mencapai tujuan holistik, mencakup kognitif, afektif, psikomotorik realitasnya hanya pada aspek kognitif saja yang berpengaruh terhadap pysicsikologi karena pemaksaan untuk menguasai aspek kognitif pada saat yang sama pada tataran realitas terjadi ketidakseimbangan dengan usianya.

Sehingga dibutuhkan pendidikan karakter yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif namun aspek psikomotorik dan afektif juga sangat penting. (Jejen Musfah, 2012 : 140-141). Tujuan holistik pendidikan merupakan salah satu prioritas utama bagi setiap pemerintahan baik ditingkat pusat maupun di daerah termasuk pemerintah provinsi Maluku Utara. Wilayah kepulauan dengan bentangan pulau yang variatif baik dari segi luas maupun letak dengan berbagai dinamikanya, berdampak pada kebijakan terutama pada aspek implementasi termasuk didalamnya kebijakan pendidikan yang hingga kini masih diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kapasitas pemerintah daerah dalam pelayanan pendidikan di kepulauan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, sejumlah aspek penting yang menjadi fokus identifikasi pada aspek yang langsung berpengaruh kepada pelayanan pendidikan seperti sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan, serta faktor eksternal lainnya. Terletak pada wilayah yang jauh dari akses pelayanan, perhatian dan kemauan sangat diperlukan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan pendidikan di wilayah kepulauan khususnya di Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini, menjelaskan, memberikan gambaran secara mendalam tentang objek atau fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit penelitian di lapangan. Penelitian kualitatif yang secara tidak langsung peneliti harus turun ke lapangan untuk mempelajari obyek penelitian yang diteliti guna memperoleh data yang dibutuhkan. Sumber data primer dan sekunder diperoleh dari para guru, Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti digunakan pengumpulan data maka didalam pengumpulan data digunakan teknik-teknik sebagai berikut: a). Observasi : biasa diartikan langkah yang ditempuh untuk melaksanakan pengamatan dan pencatatan secara langsung secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Observer langsung dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Sehingga observer berada bersama obyek yang diselidikinya. Sedangkan observer tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki (Hadari Nawawi 2005 : 100). Observasi secara singkat dapat di pahami bahwa metode observasi dipergunakan untuk menghimpun berbagai keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistimatis terhadap berbagai fenomena yang dijadikan sasaran pengamatan. Melalui pengamatan langsung di lapangan, maka penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi objek penelitian. b) Wawancara : yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (Interviewee) yang diberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy.J.Moleong, 1994 : 135).

III. Pembahasan

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab di Pulau Berbeda

Pengelolaan pendidikan tidak terlepas dari derajat tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang pemimpin. Sebagai leader, visi, misi, serta arah pengembangan sekolah sangat ditentukan. Komunikasi dan kerja sama antar pemimpin dan bawahan, antara sesama bawahan maupun dengan komunitas sekolah seperti komite dan orang tua siswa. Relasi internal dan eksternal sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan. Dukungan eksternal seperti orang tua siswa sangatlah penting sebagai bagian dari supporting sistem. Ditengah tuntutan akan hadirnya pimpinan yang memiliki tanggung jawab yang tinggi serta dedikasi terhadap sekolah diperhadapkan dengan kondisi yang sangat kontradiktif. Di sekolah dasar Tutuhu, sangg kpela sekolah bahkan memiliki tingkat tanggung jawab yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas yang jauh dari harapan. Salah satu guru Moh Yasin. Mengungkapkan :

Kepala sekolah memiliki tingkat kehadiran yang cukup rendah dan itu berlangsung sudah 17 tahun. Bahkan sekolah ini pernah dipalang oleh orang tua murid pada bulan april 2018 karena kepala sekolah tidak peduli dengan kondisi sekolah. Anggaran dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) . Selama kurang lebih 5 tahun tidak ada hasilnya untuk kemajuan sekolah. Kepala sekolah HS sendiri tidak betempat tinggal di Tutuhu melainkan di seberang pulau yaitu desa Bokimaake Kecamatan Kayoa Barat yang jarak yang ditempuh kurang lebih 2 jam perjalanan itupun jika kondisi laut dalam keadaan tidak berombak. Tugas dan tanggung jawab sebelumnya juga dipegang oleh kepala sekolah NM selama 15 tahun namun yang bersangkutan tinggal di pulau yang berbeda yakni desa Hate Jawa Kecamatan Kayoa Barat. Meski jarak yang ditempuh hanya 30 menit namun jika musim ombak kepala sekolah dipastikan tidak hadir. (wawancara 26 April 2019)

Kondisi di sekolah dasar negeri Tutuhu tidak jauh berbeda dengan sekolah dasar Tuamoda, kepala sekolah berdomisili di desa Loleo Jaya meskipun berada pada satu daratan namun belum tersedia moda transportasi darat. Sehingga harus menggunakan moda transportasi laut (katintin) dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam lebih. Praksis sekolah tersebut beraktivitas jika kepala sekolah hadir. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena hanya kepala sekolah sendiri yang berstatus pegawai negeri sedangkan 2 guru lainnya adalah guru bantu, itupun kehadirannya bergantung kepada kehadiran kepala sekolah. Pengabdian dan masa depan anak anak menjadi taruhan mereka. Menurutnya

Meskipun saya harus mengarungi lautan dengan kondisi laut yang tenang atau ombak, angin maupun hujan demi masa sepan anak – anak saya harus berjuang bahkan dalam kondisi sakitpun saya harus bolak balik mengajar. Distribusi guru harus menjadai prioritas kedepan agar sekolah tidak mengalami kekurangan guru seperti saat ini. Memprioritaskan putra putri anak desa tuamoda dalam rekrutmen pegawai negeri sipil penting untuk menjamin kedepan agar sekolah tersebut baiknya dipimpin oleh guru dari Tuamoda sendiri agar akses ke sekolah mudah serta control terhadap aktivitas anak didik dapat berjalan dengan baik. (wawancara 24 April 2019)

Meskipun berada pada satu daratan, sekolah dasar Kou Bala – Bala memiliki kepala sekolah yang berdomisili di desa loleo jaya meskipun jarak tempuh hanya lebih kurang 30 menit, namun kondisi laut sangat menentukan mobilitas kepala sekolah. Bagi kepala sekolah sekolah dasar Kou Bala Bala bapak Muin Jambi, melaksanakan tugas sebagai guru bukan hal baru dan dengan pengalaman menjalankan tugas kurang lebih 30 tahun di wilayah berbeda membuat aktifitas sebagai guru sudah merupakan bagian dari tanggung jawab mereka untuk mendidik anak anak di kepulauan. Menurutnya :

Sebagai abdi negara kami telah disumpah untuk siap ditempatkan dimana saja, karena yang terpenting bagi kami anak anak harus memiliki masa depan salah satunya dengan mengenyam pendidikan. Jika dibandingkan dengan gaji yang diterima maka hampir gaji saya setengahnya habis untuk biaya perjalanan terutama untuk membeli bahan bakar ketintin. Harapan kami pemerintah daerah harus mempercepat pembangunan jalan darat yang diharapkan dapat mempermudah akses transportasi antar desa di pulau kasiruta. (wawancara 22 April 2019)

Sulit menghadirkan pemimpin yang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang optimal jika domisili dan tempat tugas yang berbeda, ditambah dengan kondisi geografi dan cuaca yang terkandung ekstrim menjadi kendala tersendiri. Transportasi yang tidak mendukung baik dari aspek ketersediaan maupun rute antar desa yang tidak ada menjadi faktor pendukung yang mengakibatkan kepala sekolah memiliki kepedulian yang lemah. Kondisi antar pulau terkadang memaksa sang kepala sekolah untuk menggunakan katinting (sejenis alat transportasi rakyat antar pulau) dengan tingkat keselamatan yang rendah digunakan untuk melaksanakan tugas, sebab jika menyewa transportasi yang besar cukup mahal. Tugas dan tanggung jawab dengan domisili yang berbeda memiliki konsekwensi terhadap aktivitas kepala sekolah serta berpengaruh terhadap kinerja sekolah. Sarana penunjang strategis seperti

sarana transportasi yang memadai maupun ketersediaan perumahan guru bagi guru hingga kini belum tersedia mengakibatkan pelaksanaan tugas pun tidak optimal.

3.2. Antara Pengabdian dan Tuntutan Layanan Publik.

Menjadi pegawai merupakan salah satu cita-cita yang dambakan oleh sebahagian warga negara, tidak terkecuali menjadi guru, profesi yang membanggakan serta harapan kesejahteraan dengan sejumlah regulasi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Profesi yang membutuhkan pengabdian sehingga layak dengan pengabdian yang panjang, para guru disematkan pahlawan tanpa tanda jasa. Pengabdian yang menembus ruang dan waktu kini diperhadapkan dengan fenomena kekinian yang terkadang menimbulkan pertanyaan baru tentang sejauh mana ketulusan dan keikhlasan untuk mengabdikan. Penempatan para guru di sekolah dasar 243 halmahera Selatan tepatnya di Desa Jerat mengkonfirmasi betapa lemahnya komitmen sejumlah guru baru dan ketidak konsistenan pemerintah daerah dalam penegakan aturan. Menurut kepala sekolah dasar 243 Jeret Bapak Muhi Bahara.

Tahun 2018 terdapat 1 orang guru yang ditugaskan di sekolah dasar jeret namun kami dari pihak sekolah hanya menerima tembusan SK yang bersangkutan hingga saat ini guru tersebut tidak pernah menjalankan tugas, informasi yang kami teriam yang bersangkutan tidak menjalankan tugas karena mengetahui masalah pelayanan publik yang sangat terbatas terutama kebutuhan air bersih yang belum tersedia. Kemudian tahun 2014 kami menerima lagi satu tenaga guru namun yang bersangkutan hanya bertahan tugas 2 tahun dan kemudian pindah ke sekolah yang lain. Sampai saat ini tenaga guru yang tersedia hanya 3 orang itupun 3 orang guru honorer yang diangkat melalui program yang digagas pemerintah daerah yakni guru Halsel cerdas dan sudah 5 bulan gaji mereka belum dibayar, jika persoalan ini tidak menjadi perhatian pemerintah dikhawatirkan akan mengganggu proses pembelajaran sekolah. (Wawancara 27 April 2019)

Ketersediaan pelayanan yang optimal seperti penyediaan air bersih, perumahan dan telekomunikasi menjadi kebutuhan penting. Mobilitas akses informasi yang telah mereka nikmati menjadi bagian terpenting bagi mereka sehingga substansi sebagai pengabdian terabaikan. Kondisi tersebut diperkuat oleh lemahnya penegakan disiplin dari pemerintah mengakibatkan distribusi guru semakin tidak merata. Di desa jeret sendiri sampai hari ini belum tersedia air minum. Kesehariannya masyarakat mengkonsumsi air hujan. Jika kemarau panjang tiba masyarakat harus menggunakan ketintan untuk mengambil air di wilayah seberang. Begitu juga dengan infrastruktur lainnya. Listrik yang kini menjadi kebutuhan penting namun masyarakat jeret hingga hari ini belum menikmati aliran listrik. Faktor eksternal ini sesungguhnya yang menyebabkan sejumlah guru yang telah ditugaskan di jeret namun hingga kini mereka tidak bertugas. Berbeda dengan jeret pemenuhan fasilitas layanan seperti ketersediaan perumahan bagi para guru kini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kondisi perumahan yang demikian dipastikan setiap guru yang akan ditempatkan di sekolah tersebut tidak akan bertahan lama. Kondisi tersebut di dorong dengan keterbatasan transportasi dan telekomunikasi yang sangat terbatas.

Potret keterbatasan infrastruktur pendukung yang sama juga dapat ditemukan di Tuamoda maupun di Tutuhu akses terhadap infrastruktur pelayanan transportasi yang terbatas mengakibatkan sebahagian besar para guru yang ditugaskan di wilayah tersebut tidak optimal dalam menjalankan tugas. Aspek komunikasi yang saat ini menjadi kebutuhan vital bagi semua orang perlu menjadi perhatian serius. Begitu sebaliknya intensitas transportasi sebagai bagian terpenting dalam mendukung pelayanan pendidikan di wilayah kepulauan harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Pilihan bertugas di wilayah yang jauh dari akses informasi dan pelayanan dasar menjadi tantangan bagi setiap calon guru maupun para guru serta tenaga kependidikan.

3.3. Potret Sarana Prasarana Sekolah

Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan satuan pendidikan adalah ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Baik dalam bentuk sarana prasarana bangunan maupun lainnya. Ketersediaan sarana prasarana yang baik akan memberikan kenyamanan dalam proses pembelajaran termasuk akan menentukan keberhasilan kompetensi dasar kurikulum. serta mempermudah baik pimpinan, pendidik, tenaga kependidikan dan siswa dalam mengakses berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang layak hampir di semua sekolah terutama tingkat dasar wilayah kasiruta timur, butuh perhatian dan kerja sama dan peran dari berbagai pihak terutama internal sekolah dan dinas pendidikan maupun dengan masyarakat dan pihak ke tiga. Keterbatasan sejumlah sarana prasarana masih dialami baik gedung, maupun sarana

pendukung lainnya hampir dialami oleh semua sekolah. Menurut kepala sekolah Sekolah Dasar Tuamoda Ibu Ruslia Husen:

Gedung yang dimiliki Sekolah Dasar Tuamoda saat ini sudah tidak layak, baik dari aspek keselamatana maupun kenyamanan proses pembelajaran. wilayah tuamoda yang jauh dari pusat pemerintahan menjadi salah satu faktor kurangnya perhatian. Sekolah tuamoda saat ini membutuhkan perhatian serius karena jika tidak ada kepedulian, nasib generasi muda yang merupakan masa depan negeri ini akan hilang. Sekolah ini butuh perhatian serius terutama gedung dan sarana prasarana lainnya. (Wawancara 29 April 2019)



Dokumentasi peneliti

Gambar 1. Kondisi fisik SD 179 Halmahera Selatan

Dari aspek ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan juga sangat terbatas. Di Sekolah Dasar 179 hanya terdapat satu guru PNS yakni kepala sekolah sementara dua guru lainnya adalah honorer. Praksis pelaksanaan proses pembelajaran akan optimal jika kepala sekolah berada di tempat. Pada aspek ini perhatian pada distribusi guru sangat penting aspek pemerataan guru dapat terpenuhi dengan baik. Kondisi serupa juga terjadi di Sekolah Dasar Negeri 218 Halmahera selatan yang berada di Desa Tutuhu. Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan sangat terbatas. Sarana prasarana seperti bangku, lemari, perpustakaan, papan nama sekolah dan sarana pendukung lainnya sangat terbatas.



Dokumentasi Peneliti

Gambar 2. Kondisi sarana SD 218 Tutuhu Halmahera Selatan

Kedua sekolah yang terletak bagian timur kecamatan kasiruta ini hingga kini masih sangat terbatas dari berbagai aspek terkait dengan standar mutu pendidikan. Kebijakan pengelolaan pendidikan hanya berorientasi pada wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan mengakibatkan sebagian besar wilayah pinggir tidak mendapat prioritas.

3.4. Datang, Pergi dan Berlalu (Limitasi Pengawasan)

Wilayah Halmahera selatan yang sangat luas menyebabkan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pendidikan menjadi masalah. Baik pengawasan proses pembelajaran, pengawasan pengembangan sarana prasarana maupun pengawasan kinerja guru. Lemahnya pengawasan proses pembelajaran dapat dilihat dari minimnya kehadiran para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Lemahnya pengawasan sarana prasarana dapat dilihat dari minimnya realisasi program yang dianggarkan melalui bantuan operasional sekolah. Menurut Bapak Moh Yasin, Guru Sekolah Dasar Tutuhu :

Sudah 15 Tahun sekolah ini tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah, pengalaman selama ini para pegawai dari dinas hanya datang mengambil data. Mendokumentasikan bangunan sekolah setelah itu mereka kembali dan sampai hari ini tidak ada yang mereka lakukan untuk sekolah

ini ke depan. Tiga ruangan sudah tidak layak digunakan bahkan dalam kondisi yang memprihatinkan. Tidak ada ruang kepala sekolah, bahkan papan nama sekolahpun tidak ada. (wawancara 1 mei 2019)

Aspek minimnya pengawasan terlihat jelas dalam kasus Tutuhu. Rona kecewa dari sang guru meyakini terdapat hal yang perlu dibenahi dalam proses pengawasan. Wajar sebagai orang yang pernah didik di sekolah tersebut merasa ada hal yang perlu dievaluasi. Baik pada aspek kepemimpinan maupun hal substansi seperti perkembangan sarana prasarana yang baginya tidak ada perubahan yang signifikan.

Kondisi ril tersebut yang tidak jauh berbeda dialami sekolah dasar di desa Tuamoda. Hingga kini hanya terdapat dua ruangan yang layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran, sedangkan tiga ruangan lainnya dalam kondisi rusak yang membutuhkan perbaikan atau rehabilitasi agar dapat digunakan lagi sebagaimana semula. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ruslia Husen selaku kepala sekolah menyatakan sebagai berikut:

“Sekolah ini sejak berdirinya hingga saat ini baru mendapatkan bantuan ruang belajar sebanyak dua kali yaitu tahun 2003 dengan dua lokal yang sekarang digunakan untuk proses pembelajaran, sedangkan bantuan kedua yaitu tahun 2017 mendapatkan tambahan satu ruang belajar yang sementara ini masih dalam proses pengerjaan, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah selesai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan, sehingga membantu pihak sekolah terutama siswa dalam pembelajaran. Sedangkan yang lebih penting lagi adalah sekolah ini sangat membutuhkan rehabilitasi ruang belajar yang terdiri dari tiga ruang belajar, yang berada di sebelah timur menghadap ke barat sehingga jumlah ruang kelas sesuai dengan jumlah rombongan belajar yang dimiliki saat ini. Karena akibat kekurangan ruang kelas maka siswa masih digabungkan dalam proses pembelajaran satu ruang kelas dibagi untuk ditempati oleh dua rombongan belajar. Inilah kondisi kami di sekolah yang sangat membutuhkan bantuan dan partisipasi pihak dinas pendidikan untuk memberikan bantuan dengan merehab ruang belajar yang ada untuk berjalan baiknya proses pembelajaran.” (Wawancara 29 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat di deskripsikan bahwa ternyata permasalahan pendidikan yang dialami oleh sekolah tersebut di atas masih sangat membutuhkan penanganan atau bantuan yaitu agar segera tiga ruang belajar yang dimiliki sekolah tersebut, dapat diberi bantuan rehab oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten Halmahera selatan sehingga sekolah tidak lagi melakukan penggabungan atau merger rombongan belajar. Karena dapat mengganggu kegiatan belajar pada tingkat kelas yang lain di sekolah tersebut. Hal ini dikarenakan pendidikan dasar khususnya sekolah dasar, ada kelas rendah dan ada kelas tinggi.

Dengan demikian tentunya yang sangat dibutuhkan sekolah sebagaimana tersebut di atas sesungguhnya menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah lebih khususnya organisasi perangkat daerah yang berkompeten yakni dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Halmahera selatan sebagai organisasi teknis yang bersentuhan langsung dan menjadi kewenangan dinas. Satu hal yang menjadi sangat penting adalah adanya *empowering* pemberdayaan atas sejumlah sumber daya yang ada dalam lingkungan masyarakat setempat. Namun berdasarkan hasil observasi peneliti di desa Tuamoda ternyata, kehidupan masyarakatnya juga masih sangat memprihatinkan dengan hanya mengandalkan sumber kehidupan dilaut sehari-harinya, sedangkan penghasilan tetap yang diperoleh harapannya dari cengkih dan kelapa yang dapat dipanen enam bulan sekali untuk kelapa dan setahun sekali untuk cengkih.

Pengawasan ditingkat kecamatan yang biasanya dilakukan oleh Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kabupaten yang merupakan perpanjangan tangan ditingkat kecamatan juga hingga saat ini belum mampu melaksanakan tugas pengawasan dengan baik. Sejumlah masalah klasik yang masih menjadi aral dalam pelaksanaan pengawasan berupa alokasi anggaran yang minim, meskipun sarana pengawasan berupa speed boat yang telah tersedia. Bahkan sejak diangkat hingga saat ini kepala UPTD kecamatan Kasiruta Timur yang beribukota di Loleo Jaya belum pernah melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah. Sebagaimana yang disampaikan Kepala sekolah Jeret Muhiid Bahara

“Pengawasan biasanya dilakukan oleh Dinas pendidikan dan BKD terutama terkait dengan persiapan instrumen pembelajaran, kinerja guru dan perkembangan sarana prasarana. Pengawasan dilakukan biasayan tiga bulan atau enam bulan sekali, itupun jika kondisi laut tenang. Namun sebaliknya pengawasan akan bermasalah ketika saat musim ombak tiba dipastikan tidak ada pengawasan yang terlaksana. Pengawasan yang telah dilaksanakan selama ini belum menunjukkan kinerja yang mengembirakan, karena hingga saat ini tindak lanjut hasil pengawasan belum berjalan dengan baik. Misalnya terkait disiplin guru, terdapat guru baru yang ditempatkan di SD Jeret namun mereka tidak melaksanakan tugas dengan baik. Selain itu jumlah guru yang masih

minim tidak pernah ditindaklanjuti. UPTD kecamatanpun sampai hari ini belum pernah melakukan pengawasan bahkan pada saat ujian sekalipun pihak UPTD tidak hadir untuk memantau pelaksanaan ujian sekolah.” (wawancara 28 April 2019)

Ketersediaan anggaran dan sarana pendukung hingga saat ini masih menjadi masalah mendasar. Faktanya di UPTD Kecamatan Kasiruta Timur hingga saat ini belum memiliki sarana/ gedung yang memadai. Kantor yang digunakan merupakan bekas pos polisi yang sebenarnya tidak layak sebagai sebuah kantor. Ketersediaan anggaran yang terbatas diperhadapkan dengan jumlah sekolah dan jarak antar sekolah yang cukup jauh mengakibatkan pelaksanaan fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik.

IV. PENUTUP

Pelayanan pendidikan Dasar di Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan hingga kini masih diperhadapkan dengan persoalan keterbatasan dalam pengembangan mutu pendidikan dasar. Letak dan kondisi geografi yang jauh pusat pemerintahan mengakibatkan pelayanan pendidikan belum menjadi prioritas. Hal ini di tambah dengan minimnya kepedulian wakil rakyat dalam merespon keterbatasan tersebut. Sarana - prasarana strategis seperti perpustakaan, lemari untuk penyimpanan arsip, alat peraga untuk setiap mata pelajaran dan ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan sangat terbatas. Kondisi ini diperlemah dengan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh SKPD (Dinas Pendidikan) maupun UPTD ditingkat Kecamatan. Model pengelolaan pendidikan di wilayah kepulauan harus dikonstruksi dengan cara yang berbeda dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat. Desain model kelembagaan alternative dengan membentuk zonasi untuk mempermudah akses pelayanan serta merubah kelembagaan yang lebih berbasis di Ibu Kota kabupaten perlu di pindahkan ke wilayah zonasi.(zona pengembangan pendidikan kasiruta dan kayoa barat) Pola tersebut untuk efektivitas pelayanan dan pengawasan. Desain kelembagaan alternative ini juga harus didukung dengan pemanfaatan teknologi digital yang terjangkau sehingga proses evaluasi dan pengambilan keputusan terukur. Pemanfaatan sumber daya lokal yang berbasis pendidikan harus diprioritaskan. Dukungan anggaran yang cukup yang didorong dengan pola penanganan yang komprehensif harus menjadi solusi jangka pendek maupun panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Lating, 2014. *Indonesia Di Perbatasan Dan Kepulauan*, Potret Pelayanan Dasar, Penerbit, Interpena Yogyakarta.
- Jejen Musfah 2012. *Pendidikan Holistik*, Pendekatan Lintas Perspektif. Penerbit Kencana Prenada Media Goup. Jakarta.
- Lexy J. Moleong. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Rusli Yusup. 2011, *Pendidikan dan Investasi Sosial* , Penerbit Alfabet, Bandung.
- Nasution, 1992 *Metode Penelitian Naturalistik*, Tarsito Bandung.
- Sutrisno Hadi. 1990. *Unsur – Unsur Pokok Metode Penelitian Ilmiah*, DIKTI, Jakarta.
- Zamroni, 2000, *Paradigma Pendidikan Dan Masa Depan*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- _____,2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial* ,Gajah Mada Universty Press, Yogyakarta.